

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyandang disabilitas merupakan orang yang mengalami kelainan fisik, indera, intelektual, maupun psikososial yang dapat mempengaruhi kemampuan dalam menjalani aktivitasnya (ILO, 2014 dalam Putri & Halim, 2023). Dengan kondisi tersebut, penyandang disabilitas mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan, serta sulit untuk ikut serta beraktivitas dengan masyarakat lain (WHO, 2020 dalam Nisa, 2022). Disabilitas tidak hanya tentang kondisi kesehatan individu, tetapi juga bagaimana lingkungan mempengaruhinya dengan kondisi berbeda, termasuk struktur tubuh, aktivitas, keterlibatan dalam kehidupan, dan faktor lingkungan yang membentuk pengalaman sebagai penyandang disabilitas (Purinami et al., 2019).

Penyandang disabilitas termasuk dalam kelompok minoritas yang memiliki jumlah terbesar di dunia (Pratama, 2022). Terdapat lebih dari satu miliar orang atau sekitar 15% dari populasi global hidup dengan beberapa jenis kecacatan, yang mana 190 juta orang atau 3,8% dari total populasi diantaranya berusia 15 tahun ke atas, dan prevalensi disabilitas lebih banyak di negara berkembang (WHO, 2021 dalam Rahmawati, 2021). Seperti halnya di Indonesia, jumlah penyandang disabilitas diperkirakan mencapai 22,97 juta berdasarkan ragam disabilitas (BPS, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas di Indonesia terbagi menjadi 4 (empat) ragam, yakni penyandang disabilitas fisik,

intelektual, mental, dan sensorik, yang dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama, yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai peraturan perundang-undangan. Penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, Pada sisi lain, penyandang disabilitas intelektual dan mental adalah terganggunya fungsi pikir, serta penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera (Kemensos, 2021).

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara yang memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai makhluk hidup tanpa dibedakan (Az-Zahra & Hamid, 2022). Dalam mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas, pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD) dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Widinarsih, 2019). Akan tetapi, dengan adanya payung hukum tersebut masih belum bisa menjamin pemenuhan hak dan keadilan dari para penyandang disabilitas (Wardi et al., 2023). Aksesibilitas kaum disabilitas dalam menikmati kesetaraan pun masih jauh dari harapan (Aji & Haryani, 2017).

Selain itu, penyandang disabilitas seringkali mengalami perlakuan diskriminasi serta dianggap sebagai kelompok yang tidak terlihat dan tidak termasuk dalam strategi pembangunan (Pratama, 2022). Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas disebabkan oleh kesenjangan keterampilan, rendahnya pendidikan, stigma masyarakat, serta kondisi fisik dan sosial yang dinilai rentan (Aji & Haryani, 2017). Stigma masyarakat seringkali melihat penyandang disabilitas sebagai kekurangan, aib, kutukan, dan hal-hal negatif lainnya, sehingga

seringkali dikucilkan, dikurung, dan bahkan tidak diakui oleh keluarganya (Sharma, 2016). Hal tersebut tentu mempengaruhi akses dan partisipasi penyandang disabilitas terhadap berbagai kesempatan dan layanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja.

Dalam hal pekerjaan, penyandang disabilitas memiliki tingkat pengangguran yang tinggi dan pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan nondisabilitas (Somavia, 2007 dalam Maghfirah, 2020). Pada Bulan Februari 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) penyandang disabilitas di Indonesia hanya 44 persen, jauh di bawah TPAK Nasional dengan jumlah 69 persen. Dari 17,74 juta penduduk usia kerja penyandang disabilitas, hanya 7,8 juta yang masuk angkatan kerja (Wahyudi & Nurwulan, n.d.). Pada sisi lain, data pada SIKS-NG Pusdatin Kessos menunjukkan mayoritas penyandang disabilitas yang tidak atau belum memiliki pekerjaan sejumlah 857.207 jiwa (Kemensos, 2021).

Faktor penyebab dari rendahnya partisipasi angkatan kerja pada penyandang disabilitas diantaranya karena akomodasi serta sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk penyandang disabilitas di lingkungan kerja (Hogan et.al, 2012 dalam Maghfirah, 2020). Selain itu, penyedia lapangan pekerjaan masih berkehendak untuk mencari SDM yang berkualitas tanpa kecacatan (Aji & Haryani, 2017). Padahal, para penyandang disabilitas akan mampu menjadi seorang pekerja yang layak, serta diharapkan mampu memenuhi kebutuhan hidup dan dapat menjalankan keberfungsian sosialnya dalam masyarakat (Sholehuddin et al., 2020).

Sikap dan perilaku diskriminasi terhadap penyandang disabilitas bertentangan dengan hak-hak asasi manusia yang diakui secara universal di seluruh dunia (Ollerton & Horsfall, 2013 dalam Widinarsih, 2019). Selain itu, diskriminasi berbasis disabilitas bertentangan dengan disiplin ilmu Kesejahteraan Sosial yang bertujuan pada pemenuhan kebutuhan dan hak, pada peningkatan keberfungsian sosial, serta pada pemberdayaan individu, keluarga, organisasi, dan komunitas guna meningkatkan kondisi keberadaannya, serta mengakhiri segala bentuk diskriminasi dan penindasan (Zastrow, 2004 dalam Widinarsih, 2019).

Permasalahan disabilitas merupakan *cross cutting issue* yang perlu mendapatkan penanganan secara komprehensif dan multisektoral. Kondisi penyandang disabilitas dapat menimbulkan dampak kompleks ketika kebutuhan individu dengan keterbatasan fungsi tidak terakomodasi oleh lingkungannya, hal ini akan menghambat partisipasi penyandang disabilitas yang dapat meningkatkan risiko kemiskinan (Kemensos, 2021). Oleh karena itu, merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2019 bahwa diperlukan pemenuhan hak berupa program penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas yang dapat memenuhi kebutuhan dasar, menjamin pelaksanaan fungsi sosial, meningkatkan kesejahteraan sosial yang bermartabat, dan mewujudkan masyarakat inklusi.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 110 Tahun 2021, Kementerian Sosial RI merupakan salah satu *leading sector* dalam menyelenggarakan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Salah satu program kebijakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas yang dibentuk

oleh Kementerian Sosial RI adalah program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Penyandang Disabilitas sebagai layanan rehabilitasi sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial. Secara umum, tujuan dari program ATENSI Penyandang Disabilitas mengarah pada peningkatan kemampuan penyandang disabilitas dalam memenuhi kebutuhan, melaksanakan peranan sosial, serta menyelesaikan masalah (Kemensos, 2021).

Pada kebijakan program ATENSI Penyandang Disabilitas, sistem rehabilitasi sosial terintegrasi dengan program jaminan dan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, serta program penanganan fakir miskin (Kemensos, 2021). Program yang saling terintegrasi dapat mencerminkan program yang responsif dalam menjawab isu permasalahan. Dalam hal ini, penerima manfaat penyandang disabilitas tidak hanya memperoleh layanan rehabilitasi, tetapi juga memperoleh layanan untuk meningkatkan kemandirian sosial ekonomi dan produktivitas.

Komponen layanan langsung dalam program ATENSI untuk meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas adalah pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan (Kemensos, 2021). Pada Peraturan Menteri Sosial No. 16 Tahun 2020, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan dilaksanakan melalui pengembangan dan penyaluran minat, bakat, potensi, menciptakan aktivitas yang produktif, akses modal usaha ekonomi, bantuan kemandirian, bantuan sarana dan prasarana produksi, serta mengembangkan jejaring. Pelatihan tersebut memiliki sarana pendukung berupa Sentra Kreasi ATENSI (SKA) sebagai pusat pengembangan kewirausahaan dan vokasional serta media promosi hasil karya penerima manfaat dalam satu kawasan terpadu.

Pelaksanaan Sentra Kreasi ATENSI (SKA) dilakukan oleh balai besar/balai atau loka Rehabilitasi Sosial, serta dapat bekerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, LKS, lembaga pendidikan, dunia usaha, BUMN, organisasi, atau masyarakat (Kemensos, 2021). Dalam hal ini, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) atas Keputusan Menteri Sosial No. 221 Tahun 2022 diberikan tugas untuk menyelenggarakan sentra layanan sosial bagi pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) untuk mendapatkan layanan ATENSI. Oleh karena itu, multilayanan pada BBPPKS dapat diartikan bahwa Balai tidak hanya menyelenggarakan tugas dan fungsi kediklatan saja tetapi juga melaksanakan fungsi pelayanan sosial kepada PPKS, termasuk melakukan pelatihan pemberdayaan baik dalam *setting* rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, maupun pemberdayaan sosial (Sutisna, 2023).

Sejalan dengan hal tersebut, BBPPKS di Bandung menyelenggarakan program Sentra Kreasi ATENSI Bale Lembang sebagai salah satu wujud dan bentuk pemberdayaan masyarakat dan model multilayanan. Tujuan dari penyelenggaraan program Sentra Kreasi ATENSI Bale Lembang pada BBPPKS di Bandung diantaranya adalah untuk meningkatkan penghasilan penerima manfaat agar mampu memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan taraf hidupnya sehingga dapat hidup sejahtera dan mandiri (Sutisna, 2023).

Sentra Kreasi ATENSI Bale Lembang juga mendorong penerima manfaat untuk memecahkan persoalan secara bersama, mengambil keputusan, membangun jejaring usaha, meningkatkan kerjasama antar individu dan meningkatkan kepercayaan diri serta meningkatkan kemampuan PPKS dalam memecahkan

persoalan hidupnya. Selain itu, diharapkan para penerima manfaat mampu mandiri secara ekonomi melalui pemberdayaan pada Sentra Kreasi ATENSI Bale Lembang, sehingga dapat memperoleh keberfungsian sosial yang sempurna (Lili, 2023 dalam Sutisna, 2023).

Pemberdayaan dapat didefinisikan sebagai upaya memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dalam menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dari masyarakatnya (Ife & Tesoriero, 2008). Pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pelatihan vokasional dan kewirausahaan sangat diperlukan untuk mengembangkan kapasitas penerima manfaat yang lebih baik (Tanjung, 2023). Melalui pemberian bantuan pelatihan dan pendampingan, penyandang disabilitas akan mampu mandiri dan berkontribusi dalam bermasyarakat (Wihartanti et al., 2020 dalam Faujianto et al., 2022).

Selain itu, Wahyudin (2012) dalam studinya mengenai pelatihan kewirausahaan berlatar ekokultural menyimpulkan bahwa pelatihan kewirausahaan secara efektif dapat meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin. Keberdayaan ini tampak dalam sikap mental kewirausahaan dan kemandirian. Dengan begitu, program pemberdayaan melalui kegiatan pelatihan vokasional dan kewirausahaan dapat berpotensi meningkatkan keberfungsian sosial dari penyandang disabilitas.

Melihat pelaksanaan program pemberdayaan, sebagian besar mengacu pada perspektif bahwa ekonomi sebagai tujuan akhir yang dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat (Hikmat, 2006). Pada kenyataannya, perspektif tersebut cenderung tidak terwujud. Berdasarkan perspektif pembangunan sosial,

sesungguhnya ekonomi harus ditempatkan sebagai cara (*means*) bukan sebagai tujuan akhir, Pada sisi lain, tujuan akhirnya adalah kualitas hidup manusia itu sendiri (Harry, 1999 dalam Hikmat, 2006). Dengan demikian, setiap upaya pemberdayaan harus memuat indikator yang dilihat manfaatnya terhadap peningkatan kualitas hidup manusia dan kemaslahatannya.

Seperti halnya yang diungkapkan Dhairyya & Herawati (2019) pada penelitian dengan judul “Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi pada Kelompok Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Bandung”, menunjukkan hasil kegiatan pemberdayaan ekonomi belum memberikan dampak yang signifikan pada ekonomi rumah tangga para anggota. Namun, pemberdayaan sosial justru memberikan dampak yang lebih besar bagi kehidupan sosial para anggota kelompok penyandang disabilitas fisik tersebut. Kepercayaan diri para anggota yang terbentuk dari ikatan emosional dan komunikasi antar anggota mendorong penyandang disabilitas memiliki pemikiran terbuka dalam menyikapi kondisi fisiknya dan merespon stigma negatif mengenai penyandang disabilitas. Selain itu, para anggota pun mampu membangun identitas sosial yang lebih kuat di masyarakat yaitu sebagai penyandang disabilitas yang berdaya, dan merasa sebagai orang yang normal.

Beberapa penelitian sebelumnya mengkaji tentang pemberdayaan. Namun, penelitian tentang pemberdayaan sosial ekonomi penyandang disabilitas masih tergolong sedikit di Indonesia. Gagasan terkait pemberdayaan sebagaimana yang ditunjukkan oleh para penulis seperti Rees (1991) dan Friedman (1992) merupakan hal yang kompleks dalam pengertiannya sendiri (Ife & Tesoriero, 2008). Dengan

demikian, peneliti memiliki tantangan tersendiri untuk melakukan penelitian yang difokuskan pada pemberdayaan dalam aspek sosial dan ekonomi.

Pada sisi lain, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada proses pemberdayaan sosial ekonomi atas pertimbangan bahwa pemberdayaan merupakan salah satu upaya menuju kemandirian yang berkelanjutan. Hal tersebut karena kelompok sasaran tidak serta merta diberikan bantuan semata, tetapi pemberdayaan mengharuskan adanya partisipasi kelompok sasaran untuk dapat mengupayakan perubahan. Dengan begitu, sebelum melihat kemandirian dan kesejahteraan yang lahir dari sebuah program pemberdayaan, maka perlu untuk melihat dan menilai bagaimana rangkaian proses pemberdayaan yang dilakukan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggambarkan secara detail terkait proses pemberdayaan sosial dan ekonomi bagi penyandang disabilitas fisik dan sensorik program Sentra Kreasi ATENSI Bale Lembang yang ditinjau dari berbagai aspek.

Pada program Sentra Kreasi ATENSI Bale Lembang tidak hanya menitikberatkan pada pemberdayaan dari segi ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan pemberdayaan pada aspek sosial dari penerima manfaat. Maka dari itu, penerima manfaat program Sentra Kreasi ATENSI Bale Lembang diberikan serangkaian proses pemberdayaan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat (Sutisna, 2024). Penerima manfaat pada program Sentra Kreasi ATENSI Bale Lembang merupakan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang saat ini terdiri dari para penyandang disabilitas, fakir miskin, wanita rawan sosial ekonomi, dan kelompok rentan lainnya yang sudah menjadi binaan balai.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, bahwa pada program Sentra Kreasi ATENSI Bale Lembang diresmikan pada Bulan Maret 2023, dan saat ini terhitung telah berjalan selama satu tahun. Sejak awal peresmian, terdapat lebih dari tiga penerima manfaat non-disabilitas periode tahun 2023 telah melakukan terminasi dengan melanjutkan usaha di luar Sentra Kreasi ATENSI Bale Lembang. Akan tetapi, hal tersebut tidak berlaku pada penerima manfaat penyandang disabilitas. Dimana penerima manfaat penyandang disabilitas dari awal peresmian hingga saat ini masih tergabung dalam keanggotaan Sentra Kreasi ATENSI Bale Lembang.

Sejalan dengan hal tersebut, peneliti merasa perlu untuk mengetahui lebih dalam terkait gambaran pelaksanaan proses pemberdayaan sosial ekonomi pada program Sentra Kreasi ATENSI Bale Lembang. Dengan demikian, penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti diharapkan dapat memberikan gambaran sekaligus memberikan penilaian terkait pelaksanaan pemberdayaan sosial ekonomi bagi penyandang disabilitas dengan menggunakan pendekatan teori atau konsep yang relevan terkait dengan pemberdayaan sosial ekonomi.

Pemberdayaan sosial merujuk pada usaha mendorong kelompok lemah untuk memperoleh akses informasi, akses pengetahuan dan keterampilan, akses untuk berpartisipasi dalam organisasi sosial dan akses ke sumber-sumber keuangan (Friedman, 1992 dalam Hutomo, 2000). Pemberdayaan sosial menurut Friedman (1992) lebih mengarah kepada pemberian kekuatan untuk memperoleh akses terhadap sumber-sumber kehidupan. Pada sisi lain, pemberdayaan ekonomi adalah upaya penguatan kepemilikan individu atau kelompok pada faktor-faktor produksi, penguatan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan

gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan (Hutomo, 2000). Pemberdayaan ekonomi menurut Hutomo (2000) menekankan pada penguatan faktor produksi dan pemasaran, gaji yang memadai, serta pemberian informasi, pengetahuan, dan keterampilan.

Pada penelitian ini, konsep pemberdayaan sosial ekonomi diperoleh dari hasil adaptasi terhadap teori di atas. Ruang lingkup pemberdayaan sosial ekonomi merujuk pada upaya pemberian daya untuk memperoleh akses informasi, pengetahuan, keterampilan, kesempatan berpartisipasi, penguatan faktor-faktor produksi, dan penguatan pemasaran produk. Konsep pemberdayaan sosial ekonomi yang diperoleh dari hasil adaptasi kedua teori tersebut kemudian menjadi panduan peneliti dalam menentukan aspek-aspek yang akan diteliti.

Pada penelitian ini, aspek pertama yang dianalisis adalah pemberian akses informasi kepada penerima manfaat penyandang disabilitas fisik dan sensorik program Sentra Kreasi ATENSI. Pada pemberdayaan, akses terhadap informasi merupakan salah satu aspek penting yang menjadi kekuatan kelompok sasaran (Narayan, 2002). Indikator tingkat akses masyarakat terhadap informasi yaitu tersedianya informasi yang transparan dan kemampuan masyarakat untuk mengakses informasi (Kartono, 2004 dalam Maryatun & Lasa, 2009). Dalam hal ini, pemberian akses informasi berkaitan dengan pemberian informasi tentang program Sentra Kreasi ATENSI dan pemberian kemampuan bagi penerima manfaat penyandang disabilitas fisik dan sensorik untuk dapat mengakses informasi.

Aspek kedua yang diteliti adalah pemberian pengetahuan kepada penerima manfaat penyandang disabilitas fisik dan sensorik pada program Sentra Kreasi

ATENSI. Pengetahuan merupakan hasil dari rasa tahu yang terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu (Notoatmojo, 2021 dalam Alini, 2021). Akses terhadap pengetahuan dan informasi merupakan syarat dari proses pemberdayaan (Ife & Tesorario, 2008). Pemberdayaan melalui pemberian pengetahuan ini berfokus pada pentingnya edukasi bagi masyarakat untuk meningkatkan keberdayaan. Indikator pengetahuan terdiri dari kesesuaian dengan pekerjaan, pengetahuan tentang prosedur pelaksanaan tugas, dan pemahaman tentang prosedur pelaksanaan tugas (Yuniarsih & Suwatno, 2013 dalam Suriati et al., 2021). Dalam hal ini, pemberian pengetahuan merujuk pada proses edukasi prosedur pelaksanaan tugas dan pengembangan kewirausahaan.

Aspek ketiga dalam penelitian ini yaitu pemberian keterampilan kepada penerima manfaat penyandang disabilitas fisik dan sensorik terkait program Sentra Kreasi ATENSI. Keterampilan (*skill*) merupakan kapasitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu rangkaian tugas yang berkembang dari hasil pelatihan dan pengalaman (Dunnett, 2014 dalam Arcynthia, 2013). Karakteristik pelatihan ditentukan oleh lima komponen, yakni sasaran pelatihan yang diuraikan kedalam perilaku yang dapat diamati dan diukur, pelatih (*trainer*) yang mengajarkan pelatihan, alat dan bahan latihan, metode latihan, peserta (*trainee*) sebagai komponen keberhasilan suatu program pelatihan (Kamil, 2009 dalam Rahmat, 2015). Dalam hal ini, pemberian keterampilan merujuk pada pelatihan keterampilan yang memuat komponen tujuan pelatihan, bentuk pelatihan, metode pelatihan, pihak yang terlibat, sarana dan prasarana, hasil yang diperoleh, dan hambatan.

Aspek keempat dalam penelitian ini yaitu pemberian akses pada penyandang disabilitas fisik dan sensorik untuk berpartisipasi dalam Program Sentra Kreasi ATENSI. Partisipasi merupakan keterlibatan seseorang dalam situasi dan perasaan untuk memberikan sumbangan dan ikut bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan (Rahmawati et al., 2021). Dalam hal ini, pemberian kesempatan untuk berpartisipasi merujuk pada partisipasi pada pelaksanaan program Sentra Kreasi ATENSI Bale Lembang dan partisipasi pada kegiatan pengembangan diri yang diselenggarakan di dalam maupun di luar Sentra Kreasi ATENSI.

Aspek kelima pada penelitian ini adalah penguatan faktor produksi dalam kegiatan kewirausahaan penerima manfaat penyandang disabilitas fisik dan sensorik pada program Sentra Kreasi ATENSI Bale Lembang. Produksi merupakan suatu proses mengubah input menjadi output sehingga nilai tersebut bertambah, (Adiningsih, 1999 dalam Putro, 2014). Faktor produksi dibagi menjadi empat, yaitu lahan, tenaga kerja (SDM), modal, dan manajemen kewirausahaan (Masyhuri, 2007 dalam Ani, 2018). Dalam hal ini, penguatan faktor produksi meliputi pemberian lahan, pemberian modal, penguatan SDM, dan manajemen kewirausahaan.

Selanjutnya, aspek keenam pada penelitian ini adalah penguatan pemasaran produk kewirausahaan penerima manfaat penyandang disabilitas fisik dan sensorik program Sentra Kreasi ATENSI Bale Lembang. Pemasaran merupakan proses individu atau kelompok untuk memperoleh kebutuhan dan keinginan dengan menciptakan dan menawarkan produk (Kotler, 1997 dalam Lukitaningsih, 2014). Dalam hal ini, penguatan pemasaran meliputi penguatan pemasaran produk kewirausahaan yang diproduksi oleh penerima manfaat mencakup tujuan

pemasaran, bentuk pemasaran, metode pemasaran, pihak yang terlibat, media pemasaran, hasil yang diperoleh, dan hambatan yang dirasakan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berfokus pada pemberdayaan sosial ekonomi penerima manfaat program Sentra Kreasi ATENSI Bale Lembang sebagai program baru yang ditugaskan oleh Kementerian Sosial kepada BBPPKS di Bandung. Maka dari itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pemberdayaan Sosial Ekonomi Penerima Manfaat Penyandang Disabilitas Fisik dan Sensorik Program Sentra Kreasi ATENSI Bale Lembang pada BBPPKS di Bandung”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, peneliti menentukan permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pemberdayaan sosial ekonomi penerima manfaat penyandang disabilitas fisik dan sensorik program Sentra Kreasi ATENSI Bale Lembang pada BBPPKS di Bandung?”, selanjutnya untuk lebih memahami aspek pada penelitian tersebut, maka diuraikan kedalam sub-sub problematik sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik dari informan?
2. Bagaimana pemberian akses informasi bagi penerima manfaat penyandang disabilitas fisik dan sensorik program Sentra Kreasi ATENSI Bale Lembang pada BBPPKS di Bandung?
3. Bagaimana pemberian pengetahuan bagi penerima manfaat penyandang disabilitas fisik dan sensorik program Sentra Kreasi ATENSI Bale Lembang pada BBPPKS di Bandung?

4. Bagaimana pemberian keterampilan bagi penerima manfaat penyandang disabilitas fisik dan sensorik program Sentra Kreasi ATENSI Bale Lembang pada BBPPKS di Bandung?
5. Bagaimana pemberian kesempatan berpartisipasi bagi penerima manfaat penyandang disabilitas fisik dan sensorik program Sentra Kreasi ATENSI Bale Lembang pada BBPPKS di Bandung?
6. Bagaimana penguatan pada faktor produksi bagi penerima manfaat penyandang disabilitas fisik dan sensorik program Sentra Kreasi ATENSI Bale Lembang pada BBPPKS di Bandung?
7. Bagaimana penguatan pada pemasaran bagi penerima manfaat penyandang disabilitas fisik dan sensorik program Sentra Kreasi ATENSI Bale Lembang pada BBPPKS di Bandung?

1.3. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah di atas, penelitian ini disusun dengan tujuan untuk memperoleh gambaran terkait proses pemberdayaan sosial ekonomi penerima manfaat program Sentra Kreasi ATENSI Bale Lembang pada BBPPKS di Bandung. Lebih spesifik, tujuan dari penelitian adalah untuk memperoleh gambaran terkait hal-hal berikut.

1. Karakteristik dari informan.
2. Pemberian akses informasi bagi penerima manfaat penyandang disabilitas fisik dan sensorik program Sentra Kreasi ATENSI Bale Lembang pada BBPPKS di Bandung.

3. Pemberian pengetahuan bagi penerima manfaat penyandang disabilitas fisik dan sensorik program Sentra Kreasi ATENSI Bale Lembang pada BBPPKS di Bandung.
4. Pemberian keterampilan bagi penerima manfaat penyandang disabilitas fisik dan sensorik program Sentra Kreasi ATENSI Bale Lembang pada BBPPKS di Bandung.
5. Pemberian kesempatan berpartisipasi bagi penerima manfaat penyandang disabilitas fisik dan sensorik dalam program Sentra Kreasi ATENSI Bale Lembang pada BBPPKS di Bandung.
6. Penguatan faktor produksi bagi penerima manfaat penyandang disabilitas fisik dan sensorik program Sentra Kreasi ATENSI Bale Lembang pada BBPPKS di Bandung.
7. Penguatan pemasaran bagi penerima manfaat penyandang disabilitas fisik dan sensorik program Sentra Kreasi ATENSI Bale Lembang pada BBPPKS di Bandung.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini disusun dengan harapan mampu memberikan kegunaan baik secara teoretis maupun secara praktis bagi banyak pihak.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan Pekerjaan Sosial, khususnya untuk menambah khasanah keilmuan terkait pemberdayaan sosial ekonomi penyandang disabilitas fisik dan sensorik melalui program Sentra Kreasi

ATENSI Bale Lembang pada Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) di Bandung.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi peneliti dan para pembaca dalam memahami tentang pemberdayaan sosial ekonomi penyandang disabilitas fisik dan sensorik melalui program yang diselenggarakan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Sosial RI. Selain itu, diharapkan juga dapat bermanfaat bagi pihak pengelola dan pendamping Program Sentra Kreasi ATENSI sehingga pelaksanaan program ini dapat berjalan dengan efektif, akuntabel, dan tepat sasaran.

1.5. Sistematika Penelitian

Penelitian penelitian disusun berdasarkan sistematika Penelitian karya ilmiah yang telah ditetapkan oleh Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Penelitian karya ilmiah terdiri dari 6 (enam) BAB, yakni pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, usulan rencana program, serta simpulan dan saran.

BAB I PENDAHULUAN memuat latar belakang penelitian, perumusan masalah dengan permasalahan pokok yang diuraikan menjadi sub-sub problematik, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA memuat penelitian terdahulu dan tinjauan konseptual yang relevan dengan penelitian. Dalam Penelitian penelitian ini terdapat 4 (empat) penelitian terdahulu yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian peneliti. Selain itu, pada BAB 2 memuat tinjauan konseptual tentang

pemberdayaan secara umum termasuk pemberdayaan sosial dan pemberdayaan ekonomi, tinjauan konseptual tentang penerima manfaat yang difokuskan pada penyandang disabilitas fisik dan sensorik, tinjauan konseptual tentang kewirausahaan sosial, serta tinjauan konseptual tentang pekerjaan sosial yang relevan dengan pemberdayaan dan penyandang disabilitas.

BAB III METODE PENELITIAN memuat desain penelitian, penjelasan istilah, penjelasan latar penelitian, sumber data dan cara menentukan sumber data, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, teknik analisa data, serta jadwal dan langkah-langkah penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN memuat gambaran lokasi penelitian dan program Sentra Kreasi ATENSI Bale Lembang pada BBPPKS di Bandung, hasil penelitian, dan pembahasan.

BAB V USULAN PROGRAM meliputi dasar pemikiran, nama program, tujuan, sasaran, pelaksana program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan, dan indikator keberhasilan.

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN sebagai BAB terakhir yang memuat kesimpulan dan saran terkait penelitian yang dilakukan.